



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS RIAU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ARAS MULYADI
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 51892

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 840.975.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , WARISAN Rp. 261.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 76.375.000
3. Tanah Seluas 2442 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
7. Tanah Seluas 1827 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 658.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV RU1 1.5 E CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ RS MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000



4. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2021, HASIL  
SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.061.605.837
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.660.580.837
III. HUTANG	Rp.	121.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.539.580.837

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.